



# LAMPIRAN

## Lampiran 01. Surat Permohonan Data dan Wawancara



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU  
 Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng  
 Telp. (0362) 22063 Singaraja  
 Alamat e-mail : [dpmpstp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmpstp@bulelengkab.go.id)  
 Website : [dpmpstp.bulelengkab.go.id](http://dpmpstp.bulelengkab.go.id)

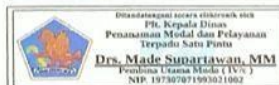
Nomor : 503/678/REK/DPMPSTP/2025  
 Lamp :  
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :  
 Yth, Kepala Badan Pengelolaan  
 Keuangan dan Pendapatan  
 Daerah Kabupaten Buleleng

di-  
**Tempat**

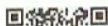
- i. Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1604/JN48.13.1/DL/2025 Tanggal 28 Juli 2025 Perihal Permohonan Data dan Wawancara
- ii. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Ni Putu Ratna Dewi  
 NIK : 5101047107030002  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Banjar Warnasari Kelod, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
- Bidang / Judul : Analisis Rasio Pertumbuhan dan Ketersediaan Serta Efisiensi Belanja untuk Menilai Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024
- Jumlah Peserta : 1 Orang  
 Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng  
 Lamanya : 9 bulan (1 Mei 2025 - 1 Januari 2026)
- iii. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
  - Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
  - Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
  - Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
 PADA TANGGAL : 30 Juli 2025



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- Yang Bersangkutan



## Lampiran 02. Transkrip Wawancara Peneliti

Nama : Putu Ayu Mira Kusuma Dewi SE, M.Ap.  
 Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Buleleng  
 Alamat Wawancara :Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng  
 Hari/Tanggal : 27 Agustus 2025

Peneliti	Dari kenaikan realisasi belanja daerah setiap tahunnya apakah ada faktor-faktor utama yang menjadi pendorong utama pada peningkatan realisasi belanja thn 2020-2024?
Narasumber	<p>Pada kenaikan realisasi belanja ini, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Setiap tahun pasti ada belanja pegawai, dan setiap tahun pasti ada penambahan pegawai, jadi otomatis, misalnya kami tidak ada penambahan pegawai atau pengangkatan P3K, jadi ASN ini akan mengalami yang namanya gaji berkala setiap 2 tahun sekali, otomatis gaji pegawai mengalami peningkatan untuk pegawai yang sudah jadi pegawai/PNS, otomatis itu untuk peningkatan kualitas SDM, kemudian ada infrastruktur juga yang dimana setiap tahun infrastruktur sudah pasti berkembang. Pemerintah juga pasti akan mengalokasikan belanja belanja yang memang menjadi belanja program prioritas, misalnya akan dibuat mall pelayanan publik, otomatis akan ada belanja modal disitu, yang termasuk pada bagian faktor internalnya (1. Sumber daya manusia, 2. Pengembangan infrastruktur, 3. Peningkatan investasi, 4. Alokasi belanja yang menjadi program prioritas pemerintah, misalnya ada perbaikan jalan dimana, atau membuat mall pelayanan publik.)</p>

lain-lain yang sah. Dari ketiga komponen tersebut, yang dimana PAD merupakan pendapatan Kab.buleleng sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, serta PAD lain-lain yang sah hasil pengelolaan daerah.

Bilamana kita anggap seperti mahasiswa yang dimana kita sebagai mahasiswa semisal satu bulan mendapatkan uang saku sebesar 1 juta. Otomatis dari uang saku ini, kita mengalokasikan, dari penghasilan sendiri mungkin 200 rb, tapi dari transfer orangtua 800 rb, karena posisi bulanan sekarang kemandirian fiskalnya masih rendah, yang dimana masih bergantung pada dana transfer. Dari sini bisa dilihat yang dimana dana transfer dari orang tua tidak bisa meyakini 100%, bahwa itu akan dikirimkan rutin, bisa jadi orangtua ada kondisi keperluan lain, jadinya transfernya tidak 800, bisa jadi ditansfer 700, jadinya tidak full 100%. Jadi dalam mengalokasikan anggaran ini juga seperti begitu, anggaran belanja ini akan dipakai untuk belanja apa saja, misalannya mau beli printer. Kita upayakan dulu dari belanja pegawai, yang dimana itu dari pemerintah pusat/ DAU. Untuk PAD sendiri kita ada yg namanya tambahan penghasilan diluar gaji, tambahan penghasilan diperoleh dari sumber dana PAD. Jadi kita memaksimalkan dulu potensi PAD kita, misalkan dalam jangka waktu 1tahun kita targetkan 500 jt/500 Miliar, bagaimana caranya agar kita memaksimalkan mencapai target ini. Kan sudah disusun rancangan APBD sebelum tahun anggaran datang. Seperti di tahun 2024 kita sudah menyusun rancangan untuk thn 2025, dan di tahun 2025 kita sudah menyusun untuk di tahun 2026, pendapatan kita bagaimana, potensi kita bagaimana, ada gak potensi potensi baru khusus untuk PAD. Ada tidak ya rumah makan baru, kira-kira progresnya ini bagaimana, perlu tidak kita untuk melakukan pendataan ke desa-desa, hotel-hotel, melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk kita

	<p>bisa menggali potensi. Karena dari penggalian potensi otomatis menambah penerimaan pemerintah daerah, yang dimana bisa lah kita melakukan belanja, jadi sangat berhubungan sekali antara penerimaan kita dengan realisasi belanja, kalau tidak ada uang, yaa tidak bisa kita belanja, kemudian ada yg namanya, jika belanja kita lebih besar dari pendapatan ini terjadi di tahun 2022 defisit. Yang dimana pendapatan sebesar 2,78 triliun, sedangkan belanjanya 2,79 triliun. Kalau dilihat pemerintah mengalami defisit sebesar 783, tetapi kok kita masih bisa jalan? Dapat darimana? Ada yang namanya penerimaan pembiayaan ( berasal dari uang silpa). Jadi realisasi/sumber dana yang kita gunakan untuk belanja berjalan ini tidak hanya dari PAD, atau sumber pendapatan daerah saja, tetapi ada yang namanya penerimaan pembiayaan atau dana silpa dari tahun anggaran sebelumnya di tahun 2021. Dana silpa di thn 2021 akan masuk di penerimaan pembiayaan di thn 2022. Jadi karena ada uang lebih di thn 2021, kita anggarkan lah di thn 2022. Jadi walaupun dilihat dari realisasi belanja dan pendapatan, knp kita belanjanya lebih besar dari pendapatan karena pemerintah mendapatkan penerimaan pembiayaan. Di thn 2022 mengalami defisit tapi karena adanya penerimaan pembiayaan, belanjanya bisa jadi terealisasikan.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana strategi awal pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merespon kondisi covid-19 pada tahun 2020, terutama terkait dalam penyesuaian anggaran dan prioritas belanja?</p>
<p>Narasumber</p>	<p>Jadi ditahun 2020 sudah ada aturan dari pusat, bahwa alokasi belanja memang difokuskan kepada pelayanan kesehatan, pemerintah daerah membuat tempat isolasi untuk masyarakat yang dimana belanja-belanjanya difokuskan untuk penanganan bencana-bencana seperti pandemic covid-19. Jadi prioritas belanjanya diutamakan untuk pelayanan kesehatan guna menunjang</p>

	penanganan covid-19.
Peneliti	Apakah ada kendala internal, seperti kapasitas sumber daya manusia, atau system administrasi keuangan yang mempengaruhi proses perencanaan, dan realisasi belanja daerah sehingga adanya terjadi fluktuasi pada thn 2020?
Narasumber	Tahun 2020 kab. Buleleng realisasinya rendah dikarenakan adanya covid, yang dimana covid ini merupakan factor eksternal dikarenakan seleuh dunia terkena dampaknya. Yang dimana pada thn 2020, kab. Buleleng mengalami efisiensi belanja, yang dimana belanja-belanja di prioritaskan ke sector/ pelayanan kesehatan untuk nakes-nakes yang ada di kab. Buleleng. Realisasi pendapatan thn 2020 menurun karena efisiensi pada saat covid. Kab buleleng hanya bisa mencapai pendapatan daerah diangka 2,3 triliun, yang dimana dana transfernya sudah 1,5 Triliun, sedangkan untuk PAD nya hanya 314 Miliar. PAD nya pada saat itu sangat kecil dikarenakan covid.
Peneliti	Apa saja factor yang mempengaruhi penurunan dan peningkatan kinerja belanja daerah kabupaten buleleng pada tahun 2020? Apakah ada factor-faktor yang specific yang paling mempengaruhi penurunan kinerja belanja daerah tersebut, apakah pandemic covid ini menjadi factor dominan?
Narasumber	Iya, covid-19 menjadi factor dominan ketika terjadinya penurunan kinerja belanja daerah tersebut. Karena pada saat itu uang tidak ada, dan pendapatan daerah sangat kecil, sehingga kab. Buleleng menyesuaikan belanjannya. Pada saat covid pun, sebagian pegawai WFH.
Peneliti	Dalam konteks keserasian belanja pada tahun 2020, belanja operasional mendominasi. Apakah ini merupakan dampak

	<p>langsung dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas layanan dasar ditengah pandemic, atau ada factor lain yang menyebabkan dominasi belanja operasional?</p>
Narasumber	<p>Belanja operasional itu merupakan sudah termasuk kedalam gaji pegawai, kemudian adanya belanja barang jasa, belanja hibah dan bantuan social. Otomatis yang namanya pada saat itu pandemic covid-19, pemerintah fokuskan ke tenaga kesehatan biar dapat gaji dan juga pegawai yang bekerja di pelayanan kesehatan masyarakat, seperti di BPKPD saat ini ada pelayanan pajak, yang dimana semua pegawai kekantor setiap hari, serta SKPD-SKPD lain (Satuan Kerja Perangkat Daerah), tetapi ada beberapa pegawai yang melakukan WFH (work from home). Tetapi di BPKPD termasuk yang mengambil pelayanan setiap hari, jadi gajinya memang kita tetap terus dibayarkan. Kemudian belanja barang jasa yang menjadi fokus belanja barang jasa yaitu belanja-belanja non ASN. Untuk belanja modal pada saat itu memang bukan menjadi belanja prioritas pada saat itu. Karena pemerintah berpikir bagaimana agar masyarakat tetap hidup disaat pandemic covid-19. Contohnya saat dipariwisata mereka tidak mendapatkan penghasilan, kita berikan bantuan social untuk bisa menopang hidup keluarga. Dan yang paling penting yaitu layanan kita kepada masyarakat, itu menjadi sangat penting dibelanja operasional, seperti belanja barang jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan social, yang dimana memang belanja yang difokuskan untuk masyarakat.</p>
Peneliti	<p>Rasio efisiensi belanja di tahun 2020 masih cukup baik dengan persentase (93,71%) meskipun terjadi penurunan pertumbuhan belanja. Bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran agar tetap efisiensi ditengah pandemic tersebut?</p>

Narasumber	<p>Jadi pada saat belanja daerah kita fokuskan pada pendapatan kita, jika pendapatan kita kecil, kita jangan belanja lebih besar dari pendapatan. Contohnya barang yang akan kita perlu efisiensi seperti kertas, kertas sangat diperlukan saat pelayanan pajak, jadinya pelayanan pajak dibuat online, jadi tidak banyak penggunaan kertas dan kita bisa melakukan efisiensi. Jadi uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kertas bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat yang terkena covid-19.</p>
Peneliti	<p>Dengan mempertimbangkan atau melihat penurunan signifikan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2024, upaya apa saja yang sedang atau akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten buleleng untuk mengatasi rendahnya tingkat realisasi belanja dan meningkatkan efisiensi anggaran dimasa mendatang?</p>
Narasumber	<p>Kenaikan dan penurunan belanja ini tergantung dari factor eksternal dan internal. salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah digitalisasi, baik dari digitalisasi system, kemudian juga baik dari digitalisasi pembayaran, dan digitalisasi pelayanan dan system atau yang disebut 3D. jadi masyarakat bisa membayar pajak/retribusi dimana saja dan kapan saja. Karena pajak merupakan komponen utama PAD pemerintah. Jadi dengan adanya digitalisasi bisa memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dan menerima pelayanan pajak, jadi dengan masyarakat membayar pajak otomatis itu akan menunjang program kinerja dari yang sudah dianggarkan, misalnya seperti belanja infrastruktur, atau perbaikan jalan didesa yang jalannya rusak, pemerintah juga mengeluarkan yang namanya relaksasi, , tidak hanya pemerintah, tetapi perbankan juga mengeluarkan yang namanya relaksasi, relaksasi ini merupakan program yang dibuat oleh masyarakat untuk meringankan beban masyarakat saat membayar pajak, yang</p>

	<p>dimana kondisi ekonomi pada saat covid-19 betul-betul terpuruk sekali. Bagaimana masyarakat mau membayar pajak, mereka saja masih susah, karena tidak ada pemasukan. Yang dimana akhirnya pemerintah mengeluarkan relaksasi pajak. Khususnya PBB, jadi masyarakat berapa tahun waktu itu, dan dendanya dihapuskan. Jadi pemerintah memiliki program seperti itu untuk meringankan beban masyarakat, sama seperti samsat yang program pemutihan.</p>
Peneliti	<p>Terkait dengan dominasi belanja operasional dan porsi belanja modal yang cenderung menurun, bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara belanja konsumtif dan belanja produktif untuk mendorong pembangunan jangka panjang?</p>
Narasumber	<p>Kalau untuk belanja modal itu memang untuk pembangunan seperti pembangunan gedung kemudian juga pembelian asset untuk menunjang program kegiatan pemerintah, tetapi yang namanya pemerintah apakah dengan pendapatan kita yang masih belum tau berapa pendapatan kita berapa tahun ini, apakah kita masih bisa menggali potensi lain untuk menambah pendapatan kita. Dengan infrastruktur yang sudah ada kita manfaatkan dulu itu, yang dimana menyebabkan mengapa porsi belanja operasional lebih tinggi dibanding belanja modal, karena pemerintah masih memanfaatkan infrastruktur yang lama.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pemerintah daerah berencana untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) agar dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai belanja daerah?</p>
Narasumber	<p>Upaya-upaya untuk meningkatkan PAD yaitu seperti digitalisasi system dan digitalisasi servis. Kemudian juga menggali potensi-potensi pada hotel, atau restoran, atau vila yang baru, misalnya</p>

	<p>yang didesa. Kemudian seperti café-café yang memang tempatnya terpencil tapi banyak pengunjung, dan untuk hotel, restoran, café atau vila yang baru wajib daftar wajib pajak. Adapun potensi lain yaitu dengan memasang program dengan BPD Bali yang namanya POS, yaitu Point Of Sale, jadi kita tau transaksinya berapa, akhirnya dari pembayaran yang dari dibawah 10 jutaa bisa naik ke 48 juta.</p>
Peneliti	<p>Apa langkah-langkah yang akan diambil untuk mempercepat proses pembayaran dan meminimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), terutama mengingat fenomena keterlambatan eksekusi pembayaran pada tahun 2024?</p>
Narasumber	<p>Untuk Sekarang ada yang namanya kartu kredit Pemerintah Daerah. Masing-masing perangkat daerah mempunyai kartu ini. Biasanya kita melakukan belanja, belanja makan minum saat rapat, yang dimana kartu itu bisa digunakan tanpa menunggu SPJ Cair, jadi KKPD ( Kartu Kredit Pemerintah daerah) itu juga memiliki SK .</p>
Peneliti	<p>Dalam konteks akuntabilitas dan transparansi, bagaimana Pemerintah Kabupaten Buleleng akan memperkuat system pengawasan dan evaluasi belanja daerah untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat?</p>
Narasumber	<p>Untuk pengawasan pemerintah sudah menggunakan aplikasi yang namanya SIPD dari tahun 2020, yang dimana mulai dari perencanaan penatausahaan atau pembendaharaan, sampai dengan akuntansi dan pelaporan. Jadi karena 1 aplikasi, otomatis ini akan mengalir terus datanya ke pusat, jadi tidak bisa bermacam-macam. Serta dari pemerintah juga sudah ada yang namanya audit dan pada akhir tahun pada saat pemerintah membuat laporan keuangan, diaudit juga oleh BPK, untuk diaudit BPK sebanyak 2 kali dalam setahun pada pemerintah.</p>
	<p>diaudit juga oleh BPK, untuk diaudit BPK sebanyak 2 kali dalam setahun pada pemerintah.</p>

Lampiran 03. Dokumentasi Wawancara



## Lampiran 04. Riwayat Hidup

**RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ni Putu Ratna Dewi, lahir di Palasari pada tanggal 31 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak I Ketut Kertia dan Ibu Ni Ketut Yasmini.

Penulis memula pendidikan formal di SD Negeri 14 Pedungan Denpasar dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Kristen Harapan 1 Denpasar dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Melaya dan lulus pada tahun 2022.

Pada Tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik serta menyelesaikan tugas akhir dengan judul <Analisis Rasio Pertumbuhan dan Kecerahan Serta Efisiensi Belanja Untuk Menilai Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S.Tr.Ak.

